

**PROSES REKRUTMEN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
PADA PEMILU 2024  
(Studi Kasus Calon Legislatif DPRK Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AKLIMA HANDAYANI  
NIM. 170801089**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aklima Handayani  
NIM : 170801089  
Program Studi : Ilmu Politik  
Falkutas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.'*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari terdapat tuntutan atau bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap pernyataan yang disampaikan sebelumnya, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2024



Aklima Handayani

**PROSES REKRUTMEN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
PADA PEMILU 2024  
(Studi Kasus Calon Legislatif DPRK Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

**Aklima Handayani**

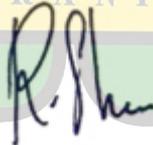
**NIM. 170801089**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh

جامعة الرانيري  
Pembimbing I

AR - RANIRY



Rizkika Lhena Darwin, M.A  
NIP. 198812072018032001

**PROSES REKRUTMEN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
PADA PEMILU 2024**

**(Studi Kasus di Calon Legislatif DPRK Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :  
**Aklima Handayani**  
**NIM. 170801089**

Pada Hari/ Tanggal : Senin 5 Agustus 2024  
30 Muharam 1446 H

Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Rizkika Lhena Darwin, M.A  
NIP. 198812072018032001

Sekretaris

Elita Zahara, S.E.  
NIP. 197607212009102002

Penguji I

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed  
NIP. 197810162008011011

Penguji II

Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M  
NIP. 107901072023211003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muli Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana proses rekrutmen partai PKS pada Pemilu 2024 serta untuk mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi partai PKS DPC Banda Aceh dalam melaksanakan proses rekrutmen tersebut. Metodologi penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan interview dengan anggota Partai PKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan secara tertutup. Kemudian untuk tantangan rekrutmen terbuka ialah kurangnya ideologi serta menurunnya kualitas calon. Sedangkan tantangan untuk rekrutmen tertutup sedikitnya kesempatan bagi warga negara secara luas/ umum.

**Kata Kunci :** *Rekrutmen, Partai PKS, Pemilu 2019*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PROSES REKRUTMEN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus Calon Legislatif DPRK Kota Banda Aceh). Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah shalallahu'alaihiwasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Kepada bapak Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan FISIP
3. Kepada Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua prodi Ilmu Politik.
4. Kepada bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik.
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 dan family S.I.P dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Dengan doa dan usaha serta dukungan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis merasa tidak mampu membalas semua bantuan yang sudah diberikan oleh keluarga, Bapak/ Ibu dan teman-teman. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang sudah kalian berikan kepada penulis.

Banda Aceh, 25 Juli 2024  
Penulis,

Aklima Handayani  
NIM. 170801089

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Praktis.....	4
1.4.2 Manfaat Akademis (Teoritis).....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori .....	15
2.2.1. Teori Rekrutmen Politik .....	15
2.2.2. Prosedur Rekrutmen Anggota Legislatif.....	17
2.2.3. Pola Rekrutmen Anggota Legislatif.....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian .....	32
3.3 Lokasi Penelitian .....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Informan Penelitian .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	36

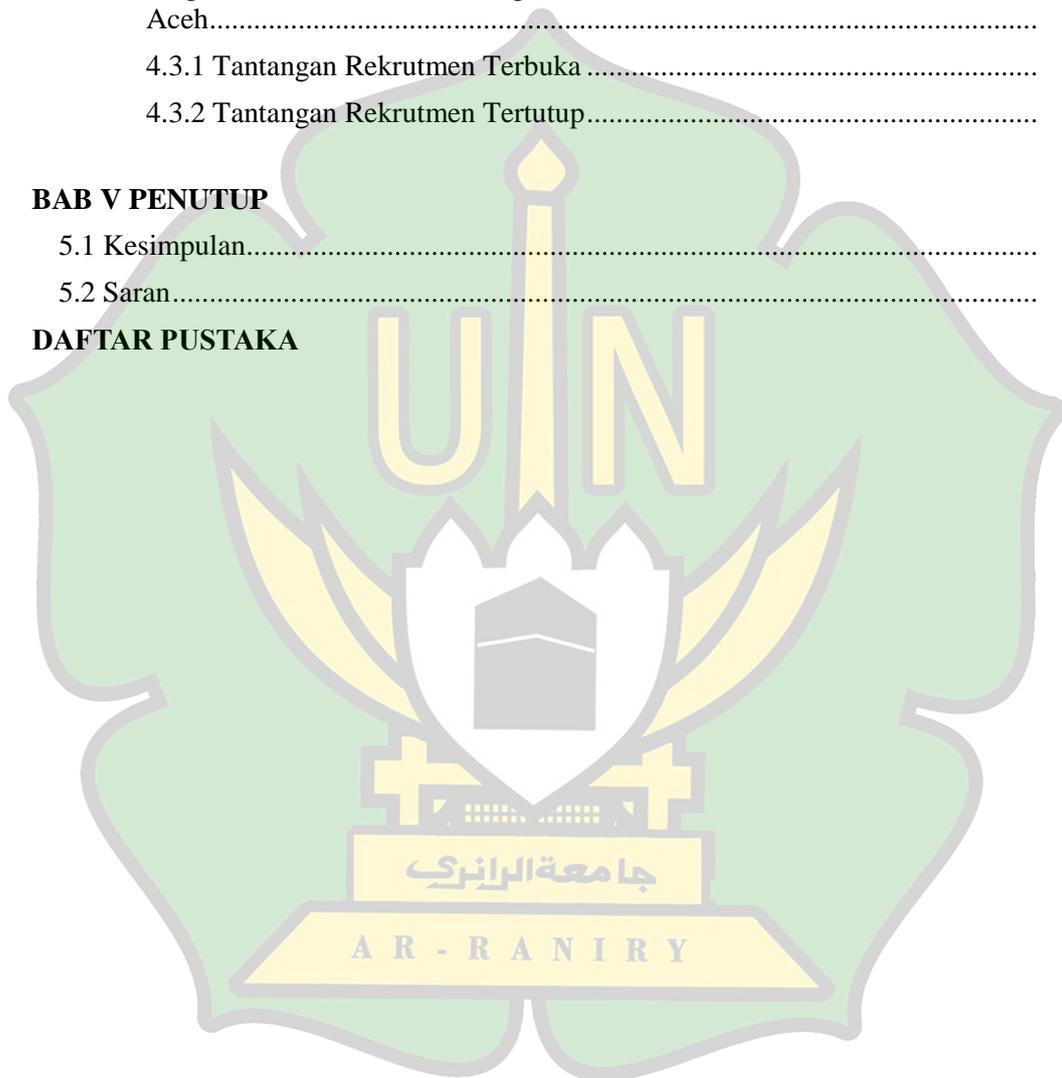
## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Profil PKS Kota Banda Aceh .....	38
4.2 Proses Rekrutmen Caleg PKS Pada Pemilu 2019 di DPC Kota Banda Aceh.....	43
4.2.1 Rekrutmen Terbuka .....	45
4.2.2 Rekrutmen Tertutup.....	48
4.3 Tantangan Proses Rekrutmen Caleg PKS Pada Pemilu 2019 di DPC Kota Banda Aceh.....	53
4.3.1 Tantangan Rekrutmen Terbuka .....	53
4.3.2 Tantangan Rekrutmen Tertutup.....	59

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan kehidupan bernegara tentunya menghormati berbagai hak dan kewajiban setiap warga negaranya serta akan senantiasa memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik dengan tujuan melakukan langkah perubahan yang nyata menuju arah yang lebih baik di segala bidang yaitu lewat salah satunya adalah suksesi demokrasi dan penempatan perwakilan rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan baik di eksekutif dan legislatif melalui proses elektoral sebagai jabatan politik maupun di lembaga legislatif yang dihasilkan melalui Pemilu (Pemilihan Umum).<sup>1</sup>

Selanjutnya sukses tidaknya pemilu tersebut tidak terlepas dari pada peran partai politik sebagai peserta pemilu. Partai politik tersebut berusaha melakukan perubahan terhadap kehidupan kenegaraan dengan misi dan visi yang beragam, yang semuanya tertuju pada pencapaian kesejahteraan bangsa dan negara. Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa

---

<sup>1</sup> Soelistyati Ismail Gani, 1984 Pengantar Ilmu Politik, Jakarta. Ghalia Indonesia,

pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan kehidupan disegala bidang.<sup>2</sup> Dengan demikian maka perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak terlepas daripada peranan partai politik yang mengisi pesta demokrasi rakyat tersebut dengan sejumlah visi dan misi partai yang bervariasi sesuai dengan ideologi yang mereka anut.

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah Partai Politik yang ditetapkan sebelumnya berjumlah 17 Partai Politik yang lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta Pemilu 2024, kini ada pembaruan data Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dari yang sebelumnya berjumlah 17 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh, kini bertambah menjadi 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh.

Adapun nama nama partai tersebut ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati NURani Rakyat (HANURA), Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nanggroe Aceh (Partai Lokal Aceh), Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Partai Lokal Aceh), Partai Darul Aceh (Partai Lokal Aceh),

---

<sup>2</sup> Nasikun, 2004. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.

Partai Adil Sejahtera Aceh (Partai Lokal Aceh), Partai Solidaritas Independen Rakyat Indonesia (Partai Lokal Aceh), Partai Solidaritas Independen Rakyat Indonesia (Partai Lokal Aceh), Partai Ummat.

Dari beberapa partai yang menjadi peserta pemilu pada 2024, sebagian besar merupakan peserta pemilu pada pemilu 2019 yang mendapatkan kursi di DPRK Kota Banda Aceh. Perolehan kursi partai politik di DPRK Kota Banda Aceh 2019 yang diikuti oleh partai nasional maupun partai lokal. Terdapat 6 partai yang berhasil mendapatkan kursi.

Perolehan suara tersebut secara berurutan yaitu PKS memperoleh 5 kursi, partai Demokrat memperoleh 5 kursi, partai PAN memperoleh 5 kursi, partai Gerindra memperoleh 4 kursi, NasDem memperoleh 3 kursi, partai Golkar sebanyak 3 kursi, partai PPP memperoleh 2 kursi, Partai Aceh memperoleh 2 kursi dan partai PNA memperoleh 1 kursi. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa partai PKS berada pada urutan pertama dengan perolehan suara sebanyak 18.148 suara dan mendapatkan 5 kursi.

Berdasarkan pemaparan data diatas memperlihatkan bahwa PKS tetap unggul dengan perolehan 5 kursi dan mengalami peningkatan suara. Dengan adanya tren peningkatan tersebut dari tahun 2019 ke 2024 rekrutment menjadi salah satu elemen penting. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara mendalam dengan judul penelitian **PROSES REKRUTMEN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus Calon Legislatif DPRK Kota Banda Aceh).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka peneliti membuat rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimana proses rekrutmen Caleg PKS pada Pemilu 2024 di DPC Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tantangan proses rekrutmen Caleg PKS pada Pemilu 2024 di DPC Kota Banda Aceh?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas maka peneliti membuat tujuan penelitian dengan tujuan penelitian ini diketahui arah dan bagaimana fokusnya. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen Caleg PKS pada Pemilu 2024 di DPC Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan proses rekrutmen Caleg PKS pada Pemilu 2024 di DPC Kota Banda Aceh.

## 1.4 Manfaat Penelitian

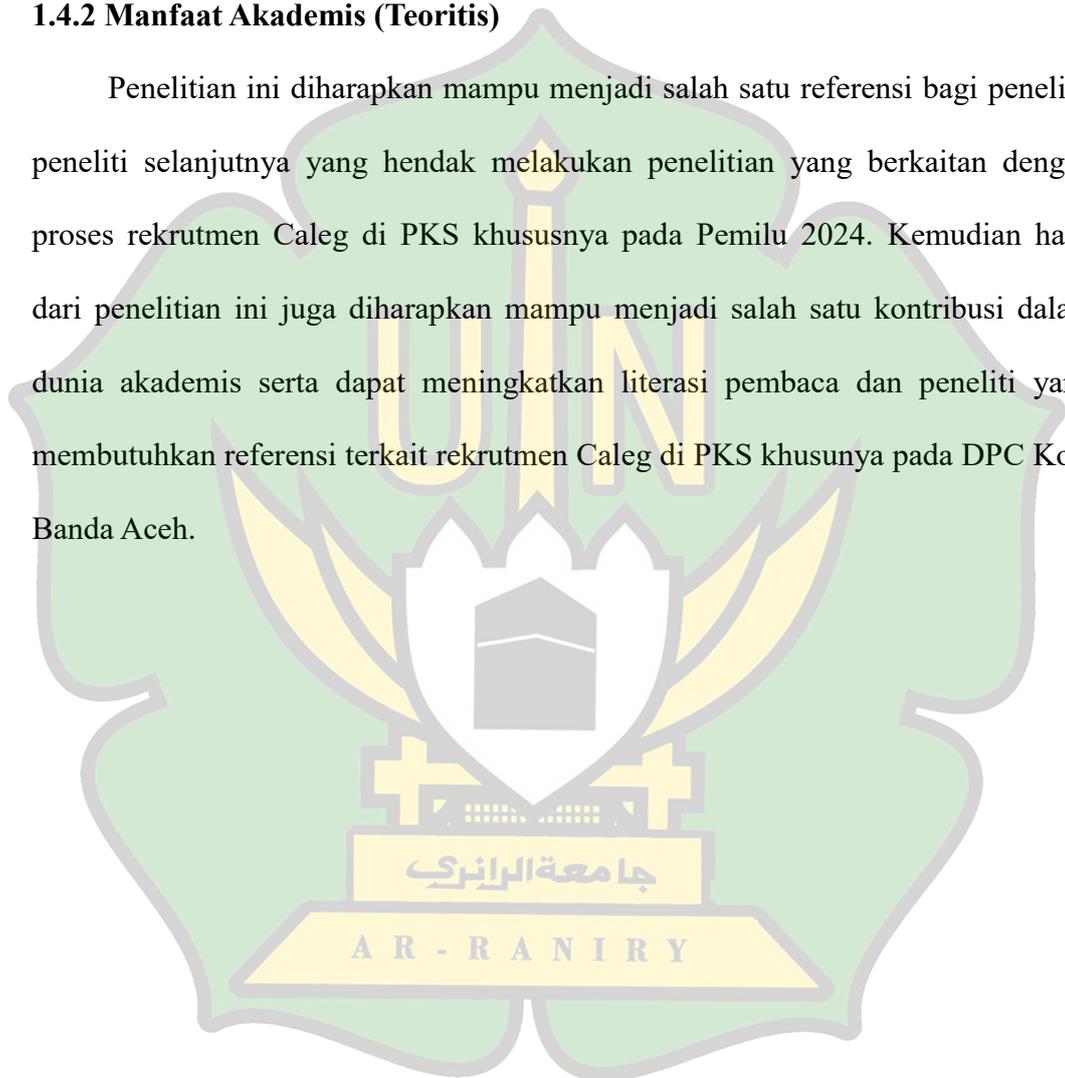
### 1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi Solusi bagi permasalahan yang diangkat terkait dengan proses rekrutmen Calon Legislatif di Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) di Kota Banda Aceh. Tentunya dengan menganalisis bagaimana proses rekrutmennya secara rinci dan juga menelaah bagaimana tantangan dalam menjalankan proses rekrutmen tersebut.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis (Teoritis)**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses rekrutmen Caleg di PKS khususnya pada Pemilu 2024. Kemudian hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu kontribusi dalam dunia akademis serta dapat meningkatkan literasi pembaca dan peneliti yang membutuhkan referensi terkait rekrutmen Caleg di PKS khususnya pada DPC Kota Banda Aceh.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan serangkaian penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan kriteria mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kajian terdahulu pada penelitian ini merujuk kepada berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan referensinya seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, artikel dan berbagai sumber acuan kredibel lainnya.

Kemudian untuk menunjang penelitian yang akan peneliti lakukan ini maka peneliti memasukkan beberapa kajian terdahulu yang masih relevan dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Sevtia Amalia Silvi (2024) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Proses dan Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Pada Pemilu 2024. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana proses seleksi dan kriteria yang dilakukan dalam rangka merekrut calon anggota legislatif pada Partai Keadilan Sejahtera provinsi Lampung pada Pemilu 2024.

Metode penelitian merupakan analisis deskriptif kualitatif dengan memakai data primer yang bersumber dari wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPW PKS Lampung dalam menentukan calon anggota legislatif menggunakan rekrutmen secara tertutup Dimana seluruh anggota calon merupakan bagian internal partai. Kemudian dalam kriteria rekrutmen merupakan

*partisanship* karena seluruh calon tidak melewati tahapan seleksi melainkan seberapa banyak dukungan suara yang mampu mereka kumpulkan.<sup>3</sup>

Aliah Maharani Tenar, La Ode Harjudin dan Joko (2024) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 (Studi DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana peran partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Pemilu 2024. Metode penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen caleg dalam Pemilu 2024 memakai peran komunikasi, Pendidikan caleg dan mengsosialisasi berbagai hal yang berkorelasi dengan kepartaian.<sup>4</sup>

Putri Kinantiara (2024) Melakukan penelitian dengan mengangkat judul Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif PDI-P Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi: di Kabupaten Bener Meriah). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif PDI-P pada pemilu tahun 2024. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaderisasi, penetapan calon legislatif pada pemilu tahun 2024 oleh PDI-P di Kabupaten Bener

---

<sup>3</sup> Sevtia Amalia Silvi, *Proses dan Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Pada Pemilu 2024*. (Skripsi Dipublikasi, 2024).

<sup>4</sup> Aliah Maharani Tenar, La Ode Harjudin dan Joko, *Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 (Studi DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara)* (Jurnal Politik dan Demokrasi, 2024). 2(1). hlm. 18-23.

Meriah masih belum terbuka terhadap masyarakat, kaderisasi dilakukan melalui zoom meeting sebanyak 2-3 kali dalam satu bulan.<sup>5</sup>

Dewi Aulia Wandarianti (2024) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pola Rekrutmen Politik Tanpa Mahar Partai Nasdem: Studi Kasus Rekrutmen Calon Legislatif di DPD Partai Nasdem Kabupaten Karawang Pada Pemilu 2019. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana pola rekrutmen politik dengan tidak menggunakan mahar politik dengan studi kasus pada calon anggota legislatif di DPD Partai Nasdem Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen tanpa mahar yang dilakukan pada saat proses rekrutmen calon anggota legislatif oleh Partai Nasdem Kabupaten Karawang menggunakan pola rekrutmen terbuka dengan strategi politik tanpa mahar yang diterapkan. Pola yang demikian tersebut diharapkan menciptakan seorang kader yang memiliki kredibilitas dan kualitas yang tinggi serta berkualitas.<sup>6</sup>

Rahmat K, Moh Iqbal Latief dan Andi Haris (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Sistem Rekrutmen Partai Gerindra (Menuju Pemilu Tahun 2024) Kabupaten Jenepono. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana sistem dan pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk persiapan pemilu tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>5</sup> Putri Kinantiara, *Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif PDI-P Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi: di Kabupaten Bener Meriah)*. (Skripsi Dipublikasi, 2024).

<sup>66</sup> Dewi Aulia Wandarianti, *Pola Rekrutmen Politik tanpa Mahar Partai Nasdem: Studi Kasus Rekrutmen Calon Legislatif di DPD Partai Nasdem Kabupaten Karawang Pada Pemilu 2019*. (Skripsi Dipublikasi UIN Sunan Gunung Jati, 2024).

bahwa DPC Gerindra Jeneponto dalam melakukan rekrutmen sangat normatif dimana membukan pendaftaran untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa syarat dan berkas yang harus dipenuhi. Kemudian rekrutmen dilakuakn dengan melakukan penjaringan, sosialisasi media sosial dan melakukan pendekatan organisasi dan melakukan juga merekrut dengan personaliti yang urgent juga adalah struktur anak cabang kecamatan dan ranting direkrut menjadi caleg serta mencari figur yang kuat yang berpotensi mendapat kursi.<sup>7</sup>

Musthofa dan Indiana Ngenget (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Analisis Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan Pemilu 2019. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana proses rekrutmen anggota legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan untuk Pemilu tahun 2019. Metode penelitian dilakuakn dengan analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kader harus melewati serangkaian tahapan dimana proses penjaringan dilakukan secara tertutup melalui penugasan atau assignment. Kemudian caleg yang diusung merupakan kader yang ditugaskan oleh struktur partai untuk berjuang terpilih sebagai anggota legislatif. Adapun proses rekrutmen tidak mengacu kepada tingkat popularitas dan elektabilitas seorang tokoh karena adakalanya seseorang yang tidak mempunyai

---

<sup>7</sup> Rahmat K, Muh Iqbal Latief, Andi Haris, *Sistem Rekrutmen Partai Gerindra (Menuju Pemilu Tahun 2024)*. (Jurnal Ilmu Sosial, 2023). 3(3). 473-479.

hal tersebut serta tidak punya finansial cukup untuk dicalonkan, karena PKS punya keunikan tersendiri serta berbeda dengan partai lainnya.<sup>8</sup>

Edeltrudis Calasansia Murni dan Haryo Ksatrio Utomo (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu dari Partai Gerindra dalam Pileg 2019 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana kebijakan terkait kuota 30% untuk perempuan dalam Pemilu dari Partai Gerindra pada Pileg 2019 di DKI Jakarta. Metode penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerindra berhasil memenuhi kebijakan 30% perempuan tersebut dalam Pileg 2019 di DKI Jakarta. Partai Gerindra melakukan proses rekrutmen dengan membuka pendaftaran secara terbuka/ umum khususnya di DKI Jakarta dengan berfokus kepada anggota perempuan yang sudah menjadi kader. Selain itu, Gerindra juga berfokus mengungkap aktivis dan Bakal Calon Anggota Legislatif yang mempunyai basis besar di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Wahyu Tristiana, Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih dan Dian Suluh Kusuma Dewi (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Analisis Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis

---

<sup>8</sup> Musthada dan Indiana Ngenget, Analisis Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan Pemilu 2019. (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 2023). 7(1). hlm. 99-110.

<sup>9</sup> Edeltrudis Calasansia Murni dan Haryo Ksatrio Utomo, Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu dari Partai Gerindra dalam Pileg 2019 di DKI Jakarta. (Jurnal Prodi Ilmu Politik, 2023). 5(1). 791-804.

bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif serta memakai pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh Gerindra dalam memperoleh anggota ialah dengan pola Partisanship, berbeda dengan prosea perekrutan untuk menduduki posisi kepengurusan Partai Gerindra yang menggunakan sistem rekrutmen terbuka-tertutup. Kemudian untuk kegiatan seleksi penyaringan dilakukan dengan wawancara, tes tulis serta tes pengetahuan kebangsaan.<sup>10</sup>

Sutri Destemi Elsi, Navarin Karim, Hapsa dan Hatta Abdi Muhammad (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Rekrutmen Calon Legislatif Berkualitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDI-P dalam menentukan calon anggota legislatif untuk ikut dalam kontestasi Pemilu 2024. Metode penelitian dilakukan dengan memberikan peningkatan pemahaman terhadap anggota partai khususnya PDI-P yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif PDI-P melalui 3 tahapan Dimana yang pertama melakukan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Legislatif, kedua Seleksi tahap I atau

---

<sup>10</sup> Wahyu Tristiana, Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih dan Dian Suluh Kusuma Dewi, *Analisis Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo*. (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023). 1(7). hlm. 2722-2853.

pemberkasan dan yang ketiga seleksi tahap II mencakup psikotes, interview dan sebagainya.<sup>11</sup>

Rahmat K, Muh Iqbal Latief dan Andi Haris (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Sistem Rekrutmen Partai Gerindra (Menuju Pemilu Tahun 2024) Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana system rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto dalam menuju pemilu tahun 2024. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPC Partai Gerindra Jeneponto dalam hal rekrutmen terbilang sangat normatif dimana membuka pendaftaran untuk menjadi calon anggota legislatif dengan beberapa berkas yang harus dipenuhi. Kemudian rekrutmen dilakukan dengan penjangingan sosial media dan pendekatan organisasi dan juga melakukan rekrutmen dengan personality yang urgent juga merupakan struktur anak cabang kecamatan serta mencari figur untuk calon anggota legislatif yang kuat dan memiliki potensi yang besar untuk memenangkan pertarungan pada pemilihan umum.<sup>12</sup>

Ni Luh Rosita Dewi, I Wayan Gede Suacana dan Diah Rukmawati (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana pola rekrutmen

---

<sup>11</sup> Sutri Destimi Elsi, Navarin Karim, Hapsa dan Hatta Abdi Muhammad, *Rekrutmen Calon Legislatif Berkualitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024*. (Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2023). 1(10). hlm. 2440-2447.

<sup>12</sup> Rahmat K, Muh Iqbal Latief dan Andi Haris, *Sistem Rekrutmen Partai Gerindra (Menuju Pemilu Tahun 2024) Kabupaten Jeneponto*. (Jurnal Ilmu Sosial, 2023). 3(3). hlm. 473-479.

calon anggota legislatif Partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Bali. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan agenda rekrutmen politik DPD Partai Golkar sendiri dikenal dengan istilah penugasan fungsionaris dengan tiga tahapan rekrutmen yakni sertifikasi, penominasian dan tahapan pemilihan.<sup>13</sup>

Aseng Yulanda, Azmi Fitriasia dan Ofianto (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana fenomena rekrutmen artis untuk menjadi calon anggota legislatif yang ditinjau melalui sudut pandang aksiologi. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif dapat dilihat melalui dua sisi. Pada satu sisi dapat dianggap positif karena memiliki popularitas di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pada sisi lain dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas yang dimiliki oleh calon legislatif tersebut karena tidak semua artis mempunyai kualitas yang mumpuni pada bidang politik khususnya untuk mewakili suara masyarakat di parlemen.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ni Luh Rosita Dewi, I Wayan Gede Suacana dan Diah Rukmawati, *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali*. (Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2023). 3(1). hlm. 17-29.

<sup>14</sup> Aseng Yulanda, Azmi Fitriasia dan Ofianto, *Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi*. (Jurnal Ilmu Humaniora, 2023). 7(1). hlm. 141-154.

Puja Dewangga dan Ratnia Soliah (2023) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka Menjelang Pemilu 2024. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk calon anggota DPRD di Kabupaten Majalengka. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen calon anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka meliputi kandidasi dan penyeleksi dan masih dapat ditemukan minimnya kegiatan sosialisasi sehingga transparansi masih dapat dikatakan kurang.<sup>15</sup>

Delya Afrida Sari, Wawan Budi Darmawan dan Firman Manan (2021) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Rekrutmen Calon Legislatif Muda Partai Golongan Karya Untuk dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana proses rekrutmen calon legislatif muda Partai Golongan Karya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metodologi penelitian merupakan deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen calon legislatif muda partai Golkar untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 meliputi lima proses yakni penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, control dan tuntutan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Puja Dewangga dan Ratnia Solihah, *Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka Menjelang Pemilu 2024*. (Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 2023). 19(1). hlm. 66-90.

<sup>16</sup> Delya Afrida Sari, Wawan Budi Darmawan dan Firman Manan, *Rekrutmen Calon Legislatif Muda Partai Golongan Karya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024*. (Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 2021). 3(3). 987-995.

Mukaukabah Alwadlo (2021) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana strategi rekrutmen calon legislatif perempuan dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan rekrutmen caleg yang dilakukan oleh PPP adalah membentuk Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2), Mensosialisasi pendaftaran caleg, Penentuan nomor urut dan dapil caleg dan pembekalan caleg, Forum konsultasi pemenangan caleg, Bantuan alat peraga kampanye, Penyediaan saksi per TPS dan terakhir melakukan Evaluasi progress report caleg.<sup>17</sup>

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Rekrutmen Politik**

Terdapat banyak tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh partai politik diantaranya ialah melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses sosial serta politik yang dilakukan dengan tujuan mengisi berbagai posisi dalam suatu jabatan politik tertentu. Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan

---

<sup>17</sup> Mukaukabah Alwadlo, *Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019)*. (Jurnal Prodi Ilmu Politik, 2021). 1(2). 24-44.

terkhusus kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang dapat dipertimbangkan kemudian partai politik melakukan serangkaian penyeleksian dan menempatkannya sebagai calon pemimpin.<sup>18</sup>

Selain itu, rekrutmen politik juga dapat didefinisikan sebagai pengisian berbagai jabatan pada Lembaga-lembaga politik dimana termasuk didalamnya partai politik dan administrasi serta birokrasi oleh orang-orang yang menjalankan pemerintahan atau kekuasaan.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik salah satu fungsi partai politik dalam mengisi jabatan-jabatan dalam sistem pemerintahan atau dapat dikatakan dengan proses membangun karir.

Kemudian dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen politik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga tahapan dimana tahapan tersebut meliputi Penyeleksian, Penominasian dan Tahap Pemilu. Pada tahapan seleksi merupakan kegiatan pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi, kemudian pada tahapan penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari yang melakukan proses penyeleksian ketika memutuskan siapa yang dapat dinominasikan. Sedangkan terakhir pada tahap pemilu merupakan rangkaian tahap terakhir yang menentukan siapa memenangkan pemilu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widusuarana, 1992).

<sup>19</sup> Dwi Rosita, *Tinjauan Yuridis Keterwakilan Perempuan dalam Proses Rekrutment Calon Legislatif Pada Partai Politik di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Juhan Perak, 2024). 5(1). hlm. 233-250.

<sup>20</sup> Roby Arya, *Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis*, Depok: Pustaka Kemang, 2016) hlm. 22-23.

### 2.2.2. Prosedur Rekrutmen Anggota Legislatif

Dalam melaksanakan kegiatan perekrutan anggota legislatif tentunya mempunyai beberapa proses dan prosedur yang harus dilewati diantaranya bagaimana pola seleksi yang diberlakukan juga bagaimana mekanisme yang dijalankan. Adapun pola rekrutmen anggota legislatif adalah sebagai berikut:

#### 1. Proses Seleksi Internal

Proses penyeleksian secara internal merupakan serangkaian rekrutmen yang dilaksanakan secara khusus untuk anggota/ kader partai dimaksud dimana dalam pola yang dilaksanakn ini cenderung tidak demokratis, tidak transparan serta mencapai kepada tahapan yang mengarah kepada oligarkis. Padahal dalam Undang-Undang Pemilu sudah diatur bahwa pencalonan anggota legislatif dilakukan oleh partai politik dengan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Akan tetapi sangat ironis bahwa pedoman internal partai politik pada umumnya masih jauh dari prinsip keterbukaan tersebut. Kemudian dari ketiga tahapan penting dalam pencalonan internal partai politik bahwa tahap penetapan calon merupakan proses yang terbilang sangat tertutup dan oligarkis. Hal ini bukan tanpa alasan melainkan karena hanya ditentukan oleh sebagian atau segelintir orang saja yang merupakan elit-elit partai politik dimana biasanya merupakan tim kecil yang dibentuk oleh partai politik dan diisi oleh ketua dan sekretaris<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

Berkaitan dengan pola rekrutmen yang dilakukan tersebut, Soetomo menjelaskan bahwa pola rekrutmen yang paling sederhana serta paling pertama untuk dilakukan studi dalam perekrutan politik terdiri atas dilaksanakannya kegiatan penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah kepada sifat pemenuhan syarat bagi pencalonan. Kemudian pencalonan yang merupakan proses kedua dalam tahapan ini yakni inisiatif dan penguatan serta ketiga melakukan kegiatan pemilihan.<sup>22</sup>

Selanjutnya tim kecil yang dibentuk tersebut memberikan wewenang dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penetapan calon anggota legislatif dari partai politik. Penetapan calon anggota legislatif berikutnya juga dengan menentukan nomor urut. Pada tahapan ini cenderung akan melibatkan berbagai interaksi antara elit yang berada pada tingkat cabang ataupun daerah dimana terutama pengurus harian partai pada tingkatan tersebut dengan melakukan koordinasi bersama tim kecil yang juga dibentuk dan diberikan wewenang dalam menetapkan calon legislatif.<sup>23</sup>

## 2. Keterwakilan Perempuan

Selain pola rekrutmen internal, keterwakilan perempuan perempuan merupakan salah satu bagian dari pola rekrutmen calon anggota legislatif dimana dalam aturannya perempuan harus terwakilkan dengan kuota minimal 30%. Terobosan atau *affirmative action* dengan kuota minimal 30% calon perempuan ternyata belum dapat terpenuhi secara optimal dilakukan oleh partai politik.

---

<sup>22</sup> Soetomo. *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*, (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 54

<sup>23</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91

Kemudian jumlah calon perempuan belum tentu mencerminkan peluangnya untuk menduduki posisi di Lembaga legislatif.

Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan disebabkan oleh sebagian calon anggota legislatif perempuan berada pada urutan yang dapat dikatakan tergolong menengah kebawah dimana secara peluang untuk memenangkan pertarungan sangat kecil jika dibandingkan dengan calon anggota legislatif yang lainnya yang berada pada urutan atas.

Kemudian dengan dijalankannya perihal tersebut maka diharapkan mampu untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap fungsinya tentunya dalam proses demokrasi. Kepercayaan publik sebagaimana yang kita sudah ketahui merupakan *condicio sine qua non* atau syarat mutlak bagi tegaknya *the rule of law* atau kedaulatan hukum dan pemerintahan yang demokratis.

Fenomena-fenomena politik dan hukum yang terjadi mengindikasikan bahwa masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan yang berjalan. Ketidakpercayaan publik terhadap politisi dan berbagai lembaga politik mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya presentase Golongan Putih (Golput) atau tidak memberikan hak pilih dan politik uang dalam pemilihan umum serta munculnya politik jalanan. Masyarakat menilai proses demokrasi tidak lebih dari sekedar pasar politik yang menjualbelikan kekuasaan publik diantara pebisnis politik, *rent seeker* atau pemburu rente dan birokrat yang korup.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

Setelah mengetahui tentang definisi dari rekrutmen politik beserta tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan di atas, maka selanjutnya peneliti akan membahas secara rinci bagaimana prosedur-prosedur, sifat serta mekanisme dalam melakukan rekrutmen politik yang bersangkutan dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi rekrutmen politik. Adapun prosedur rekrutmen politik dapat dibagi menjadi dua bentuk pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Prosedur tertutup (*Closed Recruitment Process*) merupakan sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang.
2. Prosedur terbuka (*Open Recruitment Process*) Adalah proses dimana nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi yang murni dan transparan. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman terkait hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terangterangan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fadillah Putra, Partai Politik Dan Kebijakan Politik, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 30

Terdapat beberapa mekanisme dalam rekrutmen politik, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rekrutmen terbuka

Rekrutmen terbuka merupakan mekanisme penyeleksian yang dilakukan dengan cara umum dengan syarat dan prosedur diketahui orang banyak sehingga berbagai tokoh dapat diketahui secara lebih luas. Kemudian dalam tahapan yang seperti ini partai politik memiliki fungsi sebagai alat elit politik yang memiliki kualitas baik dengan tujuan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Metode yang seperti ini akan memberikan kesempatan secara luas bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politik tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode atau cara yang dilakukan ini dinilai sangat kompetitif. Kemudian jika dihubungkan dengan pemahaman demokrasi maka metode ini juga mempunyai fungsi sebagai sarana rakyat untuk dapat andil dan berkontribusi dalam mengontrol legitimasi para elit politik. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari pola rekrutmen secara terbuka ini adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme yang demokratis
- b. Kompetitif karena kompetisi politiknya dinilai sangat tinggi dan masyarakat akan mampu untuk memilih pemimpinnya yang dinilai benar-benar sesuai dengan keinginan yang mereka kehendaki.
- c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
- d. Akan melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis serta mempunyai nilai integritas pribadi yang lumayan tinggi.

### b. Rekrutmen tertutup

Rekrutmen tertutup merupakan pola penyeleksian yang dapat dikatakan berlawanan dengan pola rekrutmen terbuka. Dalam pelaksanaannya rekrutmen tertutup dalam perihal syarat dan prosedur untuk pencalonan tidak dapat secara bebas dan diketahui umum. Akan tetapi partai memiliki kedudukan promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri.

Metode ini akan dengan sendirinya menutup kemungkinan terhadap anggota Masyarakat untuk melihat dan memberikan penilaian sejauhmana kemampuan elit yang ditampilkan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode yang seperti ini kurang kompetitif. Hal ini tentunya akan menyebabkan demokrasi hanya berfungsi sebagai sarana untuk elit memperbaharui legitimasinya.<sup>26</sup> Selain hal yang demikian juga dikenal sifat dalam proses rekrutmen seperti:

1. *Top-down* mempunyai makna bahwa rekrutmen politik yang berasal dari atas atau dari orang-orang dengan posisi sedang menjabat. Contoh dari sifat yang seperti ini ialah penunjukan secara pribadi dan kegiatan seleksi pengangkatan.
2. *Bottom-up* mempunyai makna bahwa serangkaian proses rekrutmen politik yang berasal dari masyarakat kalangan bawah seperti proses mendaftarkan diri yang berasal dari berbagai individu untuk menduduki berbagai jabatan tertentu. Contoh yang mencerminkan

---

<sup>26</sup> Ibid hlm 66

sifat-sifat yang demikian ini ialah individu-individu yang melamar kepada partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun untuk calon kepala daerah.

3. Bersifat campuran mempunyai makna bahwa proses seleksi yang dilakukan memadukan antara model *top-down* dan *bottom-up*. Adapun untuk contoh pada sifat yang seperti ini ialah terletak pada proses pemilihan umum baik itu yang merujuk kepada legislatif maupun untuk pemilihan eksekutif.<sup>27</sup>

Dengan demikian bahwa mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik terdiri dari dua sistem yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada sistem dengan pola terbuka akan memungkinkan untuk lahirnya berbagai calon anggota legislatif yang dapat dikatakan benar-benar demokratis dalam melaksanakan setiap tugas dan wewenang yang akan diembannya. Hal ini dikarenakan dengan sebab proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka.

Sedangkan untuk sistem rekrutmen dengan menggunakan pola tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka dimana para pemilih tidak mengenal berbagai calon anggota legislatif yang disebabkan oleh sistem pengangkatan calon anggota legislatif yang diterapkan tersebut dilakukan dengan cara tertutup.

---

<sup>27</sup> Maruto MD dan Anwari WMK, Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2012), hlm. 93

Hal demikianlah yang dapat memungkinkan untuk munculnya calon anggota legislatif yang tidak kompetitif serta memiliki kaitan dengan berbagai proses pengangkatan yang tidak diketahui secara umum oleh publik atau masyarakat.

### **2.2.3. Pola Rekrutmen Anggota Legislatif**

Rekrutmen politik merupakan serangkaian proses pengisian berbagai jabatan pada lembaga politik dimana termasuk didalamnya partai politik serta administrasi atau birokrasi oleh berbagai individu yang akan menjalankan kekuasaan yang bersifat politik.<sup>28</sup> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu lembaga sistem pemerintahan negara mempunyai tugas dan wewenangnya tersendiri serta memiliki tujuan supaya dalam hal pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau dapat dikatakan terjadi tumpang tindih dengan berbagai macam lembaga lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, pada Pasal 1 angka 1 sebagaimana dimaksud dengan DPR ialah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga kenegaraan yang memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Kemudian berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR merupakan suatu

---

<sup>28</sup> Suharno, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 117

lembaga yang memiliki tujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan kehidupan demokrasi yang sejalan dengan Pancasila.<sup>29</sup>

Rekrutmen politik mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem perpolitikan suatu negara. Dimana proses tersebut akan menentukan orang-orang yang akan menjalankan berbagai fungsi sistem politik negara tersebut melalui suprastruktur dan juga infrastruktur politik. Setiap sistem politik tentunya menganut berbagai pola rekrutmen yang berbeda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

Adapun pola perekrutan politik tersebut akan disesuaikan dengan AD/ART serta kebijakan berbagai partai tersebut.<sup>30</sup> Kemudian untuk perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup kedalam tiga hapan penting, sebagai berikut:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup berbagai interaksi antara elit-elit partai pada tingkatan desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai yang berada pada tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.

---

<sup>29</sup> Ibid hlm 117

<sup>30</sup> Ibid hlm 117

3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.<sup>31</sup>

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahapan rekrutmen politik sangat berkorelasi dengan bagaimana pengorganisasian partai politik tersebut. Hal ini tentunya akan melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Secara umum metode partai akan melakukan serangkaian tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang tidak sama. Adapun model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:

1. Rekrutmen terbuka Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2. Rekrutmen tertutup Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor

---

<sup>31</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 56-57.

elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.<sup>32</sup>

Berdasarkan pola yang sudah dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partai politik pada umumnya menggunakan pola yang demikian dalam melakukan rekrutmen untuk calon anggota legislatifnya. Dalam pelaksanaannya, pola-pola tersebut biasanya partai politik juga mempunyai berbagai metode dalam upaya melakukan rekrutmen politiknya. Metode rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode antara lain sebagai berikut:

1. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu.
2. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Adapun beberapa macam pola rekrutmen politik yang secara umum dilakukan oleh partai politik untuk melakukan penjaringan terhadap calon anggota legislatif antara lain sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 139-140

1. Partisan, pola ini akan melahirkan calon anggota legislatif yang kuat dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap partai sehingga dapat direkrut untuk menduduki berbagai jabatan yang strategis dan pada umumnya ini merupakan internal partai.
2. *Compartmentalization*, merupakan suatu proses rekrutmen yang berlandaskan kepada latar belakang Pendidikan dan pengalaman organisasi ataupun berupa kegiatan sosial politik seseorang sebagai bahan pertimbangan.
3. *Immediate Survival*, merupakan serangkaian proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan tingkat kemampuan orang-orang yang akan direkrut tersebut.
4. *Civil Service Reform*, merupakan serangkaian proses rekrutmen yang dilakukan dengan dasar kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga dapat memperoleh kedudukan yang lebih tinggi/ penting. Sebagai contoh ialah non-kader akan tetapi mempunyai kedekatan dengan internal partai.<sup>33</sup>

Pada tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya ialah:

1. Pengalaman Organisasi Pengalaman ini baik selama ia menjadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan

<sup>33</sup> Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. X-

hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.

2. Tingkat Pendidikan Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan perilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.
3. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.<sup>34</sup>

Berdasarkan berbagai poin tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada setiap sistem perpolitikan mempunyai berbagai prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

---

<sup>34</sup> Ibid. hlm. 76

Kemudian Cholisin mendefinisikan rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Fadillah Putra, rekrutmen politik merupakan: Suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pola rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan sistem tertutup dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.<sup>36</sup>

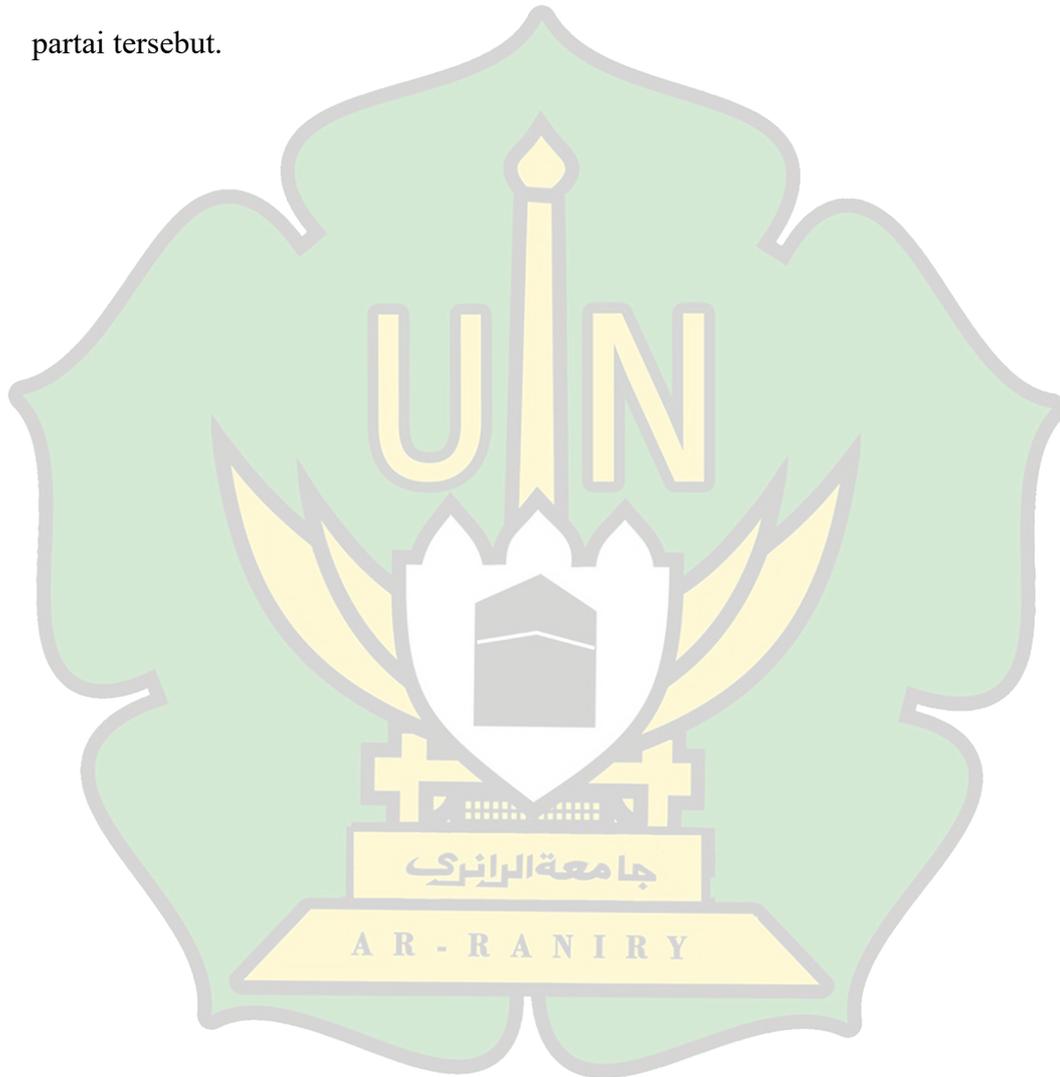
Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pola rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang

---

<sup>35</sup> Cholisin, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : FISE UNY, 2016) hlm. 113

<sup>36</sup> Fadilillah Putra. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiarawacana, 2013) hlm.

demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan sistem tertutup dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan oleh partai tersebut.



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis PROSES REKRUTMEN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU 2024 (Studi kasus calon legislatif DPRK Kota Banda Aceh). Maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>37</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus dalam pembahasan mengenai tren Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengalami peningkatan pemerolehan suara dari tahun 2019 menuju tahun 2024. Hal ini tentunya berkorelasi dengan proses rekrutmen calon anggota legislatif yang menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatnya pemerolehan suara PKS.

---

<sup>37</sup>Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018, hal.11

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena social yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Data dengan sumber primer merupakan sumber data yang dimana memuat data utama yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber ataupun informan. Sedangkan untuk sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang dilakukan tidak secara langsung pada lapangan, akan tetapi dari sumber yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya.

Adapun untuk contohnya seperti, buku, dokumen, maupun sebagainya. Pada sumber data sekunder ini juga dapat digunakan dalam penelitian, yang fungsinya juga bisa sebagai sumber data pelengkap atau bisa juga yang utama jika tidak ada narasumber pada sumber data primer.<sup>38</sup>

Terdapat banyak ragam dalam sumber data yang terdapat pada penelitian kualitatif dimana dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan posisinya dimulai dari yang nyata sampai dengan samar-samar dan terdapat dari yang primer hingga sekunder. Oleh sebab itu maka untuk memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berpikir tentang informasi yang sudah dikumpulkan serta juga berkaitan dengan validitasnya. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs

---

<sup>38</sup> Farida Nugrahani and M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2014, hlm. 113.

institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel.

### 3.5. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan.

Informan merupakan seseorang yang dinilai benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Adapun informan yang diambil dari unit analisis dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Ketua Partai DPC Kota Banda Aceh	1
2	Caleg PKS Perempuan dan Laki-laki	4
3	Tim Pemenangan PKS	2
4	Bidang Kaderisasi PKS	1
	Jumlah	8

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian yang dilakukan ialah mendapatkan serangkaian data. Dengan tidak mengetahui teknik pengumpulan data yang dilakukan maka sangat tidak mungkin bagi peneliti untuk memperoleh data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam penulisan karya ilmiah serta mendukung penelitian yang akan dilakukan.<sup>39</sup>

Teknik pengumpulan data merupakan metode/ teknik/ cara yang ditempuh oleh peneliti dalam upaya mendapatkan data yang bersumber dari lapangan atau sebagainya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data dimana yang pertama menggunakan teknik wawancara/ interview dan yang kedua dengan melakukan studi dokumentasi.

Adapun untuk penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara/ Interview merupakan percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu dimana terdapat pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terdapat terwawancara sebagai pihak yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan dengan tujuan menemukan permasalahan yang

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308.

harus diteliti. Adapun wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Partai Keadilan Sejahtera Kota Banda Aceh.<sup>40</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berkaitan dengan berbagai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulensi rapat serta berbagai agenda lainnya yang serupa. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi mempunyai keunggulan tersendiri yakni sangat efisien dari segi waktu dan tenaga.<sup>41</sup>

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses memilih serta memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap kedua setelah melakukan serangkaian kegiatan reduksi data, yakni melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara

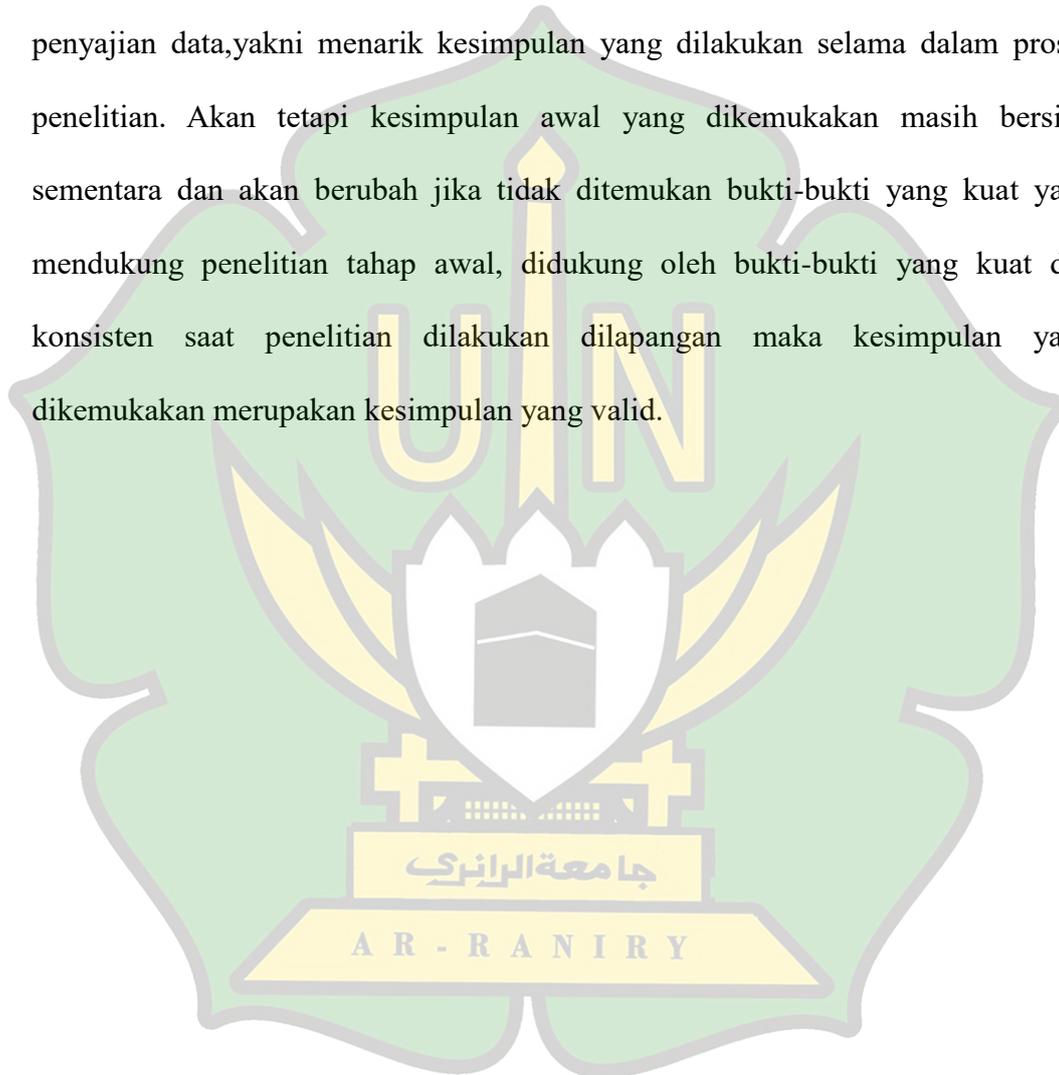
<sup>40</sup>Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

<sup>41</sup>Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

### 3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil PKS Kota Banda Aceh**

##### **1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai nasional dimana secara resmi dideklarasikan pada tanggal 20 April 2002. Kemudian pada tahun yang sama PKS bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta dilakukan pengesahan sebagai partai politik yang memiliki badan hukum oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada saat itu.

Selain itu, dengan warna dominan putih dan kuning ini juga lolos dalam serangkaian tahapan verifikasi sebagai partai politik yang dilakukan oleh lembaga lain yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) sehingga menjadikan PKS dapat ikut serta berkompetisi dalam kontestasi Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 2004.

Pada Pemilu 2004 PKS menjadi salah satu partai yang lolos dalam *parliamentary threshold* dan menjadi partai yang berhak untuk mengiimkan para wakilnya menjadi anggota legislatif di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR)/ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI). Kemudian dalam perhelatan selanjutnya PKS selalu lolos sebagai Partai Politik Nasional di DPR-RI. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk mengisi amanah dengan mengemban sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan Jilid II.

Kemudian pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 Partai Keadilan Sejahtera berada diluar pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini. PKS menjadi partai politik yang senantiasa kritis menyuarakan kebijakan yang tidak pro rakyat di parlemen. Sejak keikutsertaan PKS dalam Pemilihan Umum dari 2004 hingga 2019 jumlah pencapaian persentase suara PKS selalu meningkat dengan perolehan diatas 7%. Hanya pada 2014 mengalami penurunan pada angka 6.79%, namun secara jumlah suara mengalami peningkatan dari Pemilu 2009 yang sebelumnya sebanyak 8.206.955 suara menjadi 8.480.204.

Pada Musyawarah Nasional V Partai Keadilan Sejahtera yang digelar pada November 2020 menetapkan kepemimpinan baru PKS periode 2020-2025 dengan Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA sebagai Ketua Majelis Syura dan H. Ahmad Syaikhul sebagai Presiden partai. Kepemimpinan PKS yang baru ini membawa semangat baru dengan visi PKS menjadi partai yang rahmatan lil alamin. Beberapa perubahan terjadi mulai dari lambang partai, sampai mars dan hymne partai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh meraih suara terbanyak pada Pemilu 17 April 2019 silam. Berdasarkan data rekap tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan real count dilakukan PKS. Jumlah perolehan suara partai dakwah ini mencapai 18.148. Meningkat tajam bila dibandingkan capaian Pemilu 2014.

Dengan perolehan tersebut, maka PKS Kota Banda Aceh berhasil meloloskan lima kadernya sebagai anggota DPRK Banda Aceh. Dua diantaranya

adalah perempuan. Bahkan wakil PKS berpeluang untuk menduduki posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.

## **2. Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai Nasional secara visi bertujuan untuk menjadikan Partai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* serta berdiri secara kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan tentunya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemudian untuk misi yang dijalankan oleh PKS ialah meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai serta mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas dan profesionalitas dengan tujuan menghadirkan kepemimpinan bangsa yang memiliki iman dan taqwa serta berakhlak mulia.

Kemudian mengokohkan solidaritas partai dengan skala nasional, mandiri dan memiliki keterbukaan dengan tujuan mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan dan mengimplementasikan sistem manajemen partai yang modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja dan kredibilitas.

Selanjutnya meningkatkan kepeloporan partai dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup serta memperkuat kemitraan strategis pada berbagai sektor pengabdian dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup yang produktif, inovatif serta patriotik.

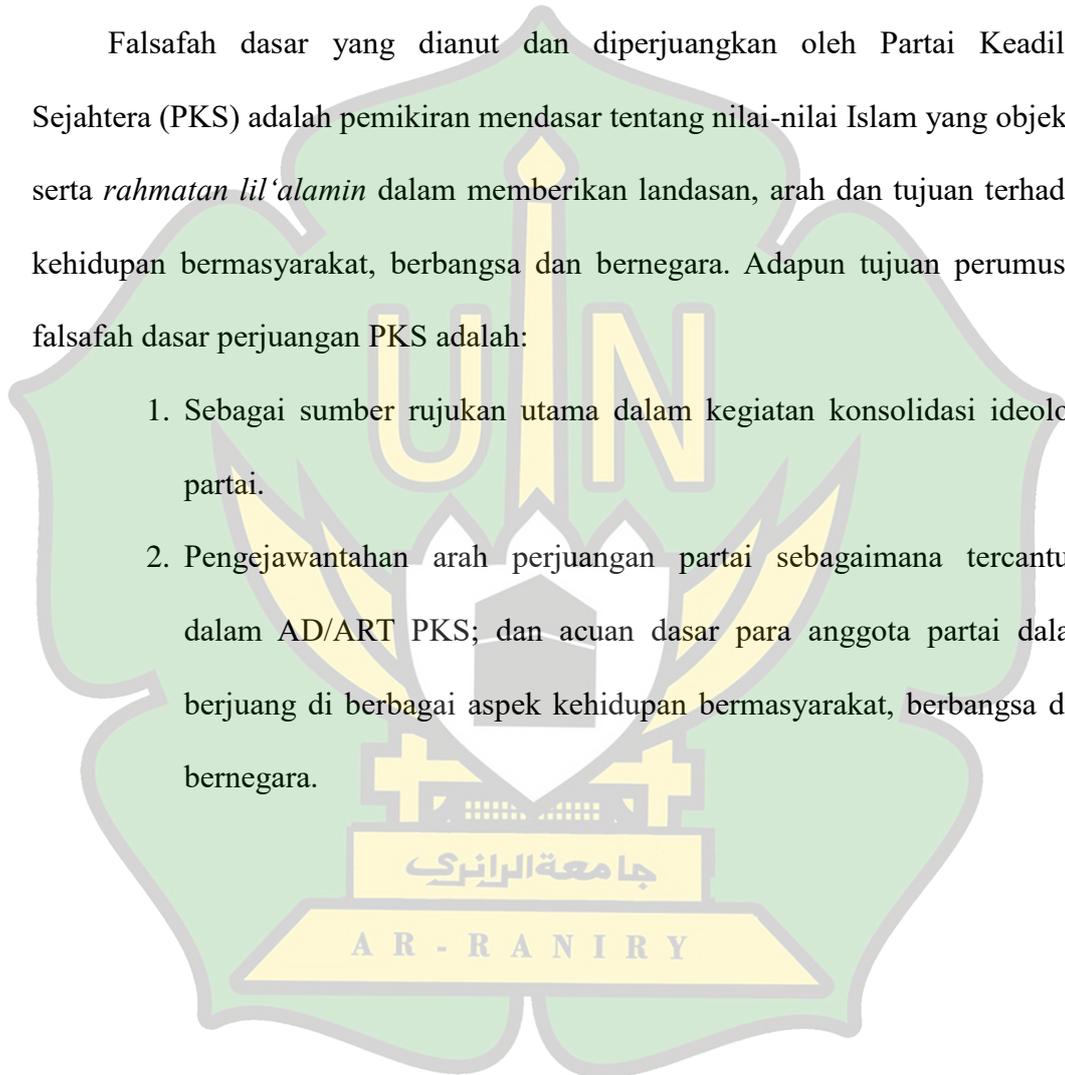
Kemudian memenangkan Pemilu 2024 serta meningkatkan kontribusi partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi,

dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan, dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkuat posisi Indonesia.

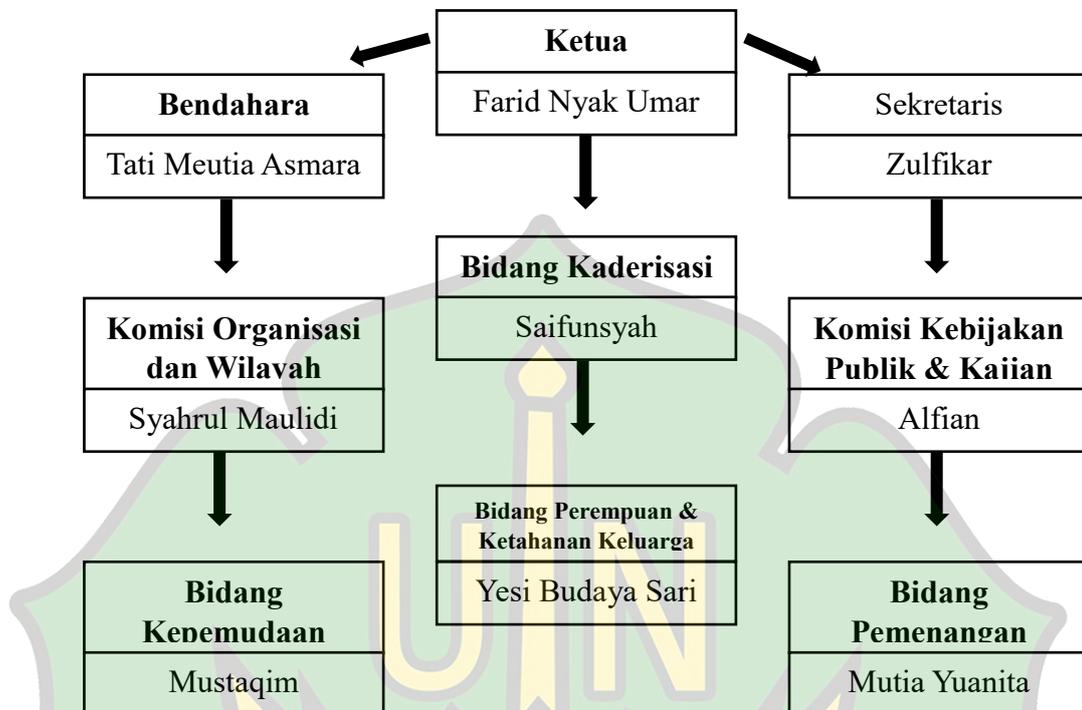
### 3. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Falsafah dasar yang dianut dan diperjuangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah pemikiran mendasar tentang nilai-nilai Islam yang objektif serta *rahmatan lil'alam* dalam memberikan landasan, arah dan tujuan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan perumusan falsafah dasar perjuangan PKS adalah:

1. Sebagai sumber rujukan utama dalam kegiatan konsolidasi ideologi partai.
2. Pengejawantahan arah perjuangan partai sebagaimana tercantum dalam AD/ART PKS; dan acuan dasar para anggota partai dalam berjuang di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



#### 4. Struktur Kepemimpinan PKS



#### 5. Syarat Menjadi Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Menjadi bagian dari partai politik tentunya akan menjadikan individu mendapatkan relasi yang lebih luas terutama pada bidang perpolitikan. Tidak hanya itu, terdapat berbagai macam keistimewaan lainnya yang tidak dimiliki oleh anggota organisasi lainnya seperti pendidikan dan pengetahuan tentang bagaimana berpolitik untuk menduduki berbagai jabatan dan posisi strategis lainnya dalam sistem pemerintahan negara.

Untuk menjadi bagian dari partai politik terutama di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari website resmi PKS, tentunya mempunyai syarat tertentu antara lain yang pertama sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dimana setiap warga negara dapat menjadi anggota

partai dengan syarat sudah berumur 17 tahun, kemudian calon anggota dapat mengajukan permohonan menjadi anggota partai PKS dengan cara mendatangi kantor sekretariat PKS atau melalui website resmi PKS, kemudian data yang kita masukkan akan diverifikasi oleh dewan pengurus PKS dan apabila sudah benar dan valid kita akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PKS.

#### **4.2. Proses Rekrutmen Caleg PKS Pada Pemilu 2024 di DPC Kota Banda Aceh**

Rekrutmen Calon Legislatif selalu berkorelasi dengan Partai Politik dimana Ia merupakan alat yang digunakan oleh individu untuk dapat menduduki sebuah jabatan politik. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2024 di Kota Banda Aceh terdapat sebelas (11) Partai Politik yang bertarung dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu diantara partai yang bertarung tersebut. Begitu penting untuk Partai Politik sadar akan fungsi akan dirinya dikarenakan berkualitas atau tidaknya seorang anggota legislatif nantinya sangat ditentukan oleh proses rekrutmen yang dilakukan oleh suatu Partai Politik dan apabila Partai Politik sadar akan tugas pokok dan fungsinya maka akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap partai tersebut.

Hal ini tentunya mempunyai perbedaan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meskipun sama-sama melaksanakan serangkaian seleksi akan tetapi yang dilaksanakan oleh KPU hanya bersifat sekunder sehingga apabila seorang Calon Legislatif (Caleg) memenuhi syarat umum maka tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak meloloskan calon tersebut menuju tahapan selanjutnya.

Kemudian tingkatan selektifnya proses rekrutmen yang dilakukan akan berdampak pada kemajuan organisasi Partai Politik karena akan tersedianya para aktifis politik yang mempunyai kualitas bagus. Sebagai unsur paling penting, tersedianya individu-individu yang mempunyai integritas mumpuni dalam menggerakkan kegiatan organisasi merupakan suatu keniscayaan.

Berbagai hal yang harus dipertimbangkan dalam upaya menghasilkan kader Partai Politik seperti yang diharapkan ialah dengan cara melakukan serangkaian pengembangan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. Berangkat dari hal tersebut maka sistem rekrutmen yang berkualitas sangat penting untuk dilakukan sebagai tahap awal dalam mendapatkan Sumberdaya Manusia yang baik. Hal tersebut diharapkan mampu menyeleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai serta ideologi partai politik. Kemudian rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilakukan dengan dua cara yakni rekrutmen secara terbuka dan rekrutmen secara tertutup.

Oleh sebab itu, maka selain syarat yang tercantu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan beberapa syarat yang melekat dalam sifat PKS terhadap Calon Legislatif (Caleg) yang akan maju dalam pemilihan legislatif, diantaranya sebagai berikut:

1. Bersedia menjadi anggota partai sesuai AD/ART PKS
2. Memiliki visi-misi yang sama dengan PKS
3. Tidak mempunyai catatan hukum
4. Tidak punya cacat moralitas
5. Dikenal luas oleh Masyarakat

6. Punya basis dukungan massa
7. Mempunyai keluarga yang relatif stabil (melihat pendidikan anak, dan keluarga yang harmonis)

#### 4.2.1. Rekrutmen Terbuka

Sistem rekrutmen terbuka merupakan sistem rekrutmen yang dilakukan dengan menyediakan serta memberikan kesempatan secara luas bagi seluruh warga negara untuk turut serta bersaing dalam proses tahapan seleksi. Dasar penilaian yang dilakukan dalam proses semacam ini ialah melalui persyaratan yang sudah ditentukan melalui berbagai pertimbangan yang rasional. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama untuk ikut serta dalam kompetisi. Kemudian terdapat dua pola yang dilakukan dalam proses rekrutmen terbuka individual dan institusional.

##### 1. Rekrutmen Individual

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan dua strategi rekrutmen: Pertama pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*) atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS. seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Bidang kaderisasi PKS sekaligus penanggung jawab dalam perekrutan caleg mengungkapkan:

Jadi kita tidak melihat latar pendidikan yang mereka punyai kita merekrut bersifat umum, biasanya kita mulai melakukan pendekatan di pesantren, sekolah dan kampus untuk mengajak bergabung ke PKS selain laki-laki kita juga ajak perempuan-perempuan lainnya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan muslimah yang ada di PKS, kalau memang mereka nyaman dalam PKS maka akan dilanjut prosesnya untuk masuk kader dalam partai.

## 2. Rekrutmen Institusional

Kedua, pola rekrutmen institusional (*al-da'wah jamai*), PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-institusi ini untuk meraup kader potensial. Rekrutmen jama'i juga bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan yang lain, seperti majelis ta'lim, sekolah ibu, studi intensif, kegiatan Ramadhan, pelatihan, baksos, santunan, dan kegiatan keegiatan yang lain. Semua jenis rekrutmen ini berorientasi menjadi pintu masuk bagi calon kader untuk menjadi peserta Tarbiyah level pemula. Ketua Partai PKS DPC Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa:

*PKS mempunyai banyak rutinitas yang dijalankan dengan tujuan merekrut calon kader seperti majelis ta'lim, liqo, tarbiyah dan kegiatan lainnya. Dari kegiatan tersebut kami turun langsung kelapangan untuk mengajak ibu-ibu bergabung hingga ibu-ibu lainnya nyaman dan senantiasa jadi partisipan partai.*

Setelah itu, PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut marhalah. Pembinaan ini mencakup proses pembelajaran (ta'lim), pelatihan keorganisasian (tanzhim), pembinaan karakter (takwin) dan

evaluasi (taqwim). Pola pembinaan kader PKS yang paling terkenal adalah pembinaan pola tarbiyah yang lebih dikenal dengan kegiatan Liqa (pertemuan) dan mentoring. Menurut konsepsi PKS, tarbiyah merupakan inti dari segala aktivitas. Apapun yang dilakukan memiliki nilai pembinaan atau pendidikan untuk meningkatkan kualitas keislaman dan harakah (gerakan). Karena itu, PKS memandang persoalan pembinaan (tarbiyah) ini menjadi sesuatu yang sifatnya inti. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa:

*Pada proses penjaringan rekrutmen yang menjadi anggota pemula yaitu yang tergabung dalam media-media rekrutmen PKS. Mereka tidak langsung dikenalkan dengan Partai Keadilan Sejahterah, namun hanya dikenalkan akan Islam dan syariatnya setelah kader pemula mengikuti pembinaan di media-media rekrutmen barulah mereka diasah pemahamannya tentang pentingnya berpolitik dengan bergabung dipartai, memahamkan akan tujuan partai PKS dan tujuan sebagai umat Islam.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKS dapat disimpulkan bahwa PKS tidak setengah-setengah dalam merekrut kadernya, PKS melakukan kegiatan perekrutan dari bawah secara sistematis dan terstruktur sehingga kader yang dibina dapat lebih berkembang dan memahami tujuan partai PKS secara politik. Penjelasan tersebut sejalan dengan teori rekrutmrn politik dimana Partai Politik dlam melakukan kegiatan penyeleksian menetapkan bakal calon yang akan diusung merupakan kader yang benar-benar aktif baik di internal partai maupun di tengah-tengah masyarakat.

#### 4.2.2. Rekrutmen Tertutup

Rekrutmen tertutup merupakan sistem rekrutmen dimana kesempatan untuk menduduki jabatan politik tidak sama antara setiap warga negara, dengan kata lain hanya individu-individu tertentu yang mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan politik seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau individu yang mempunyai latar belakang agama yang sama, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa. Terdapat dua (2) pola yang dilakukan dengan pola seperti ini yakni pendekatan dengan kader internal/ tokoh yang pernah menjabat sebelumnya serta melihat bagaimana jenjang karir tokoh tersebut.

##### 1. Pendekatan dengan Kader Internal

Selain hal diatas dalam membentuk kader yang siap tanding, maka kaderisasi adalah hal yang mutlak dilakukan oleh partai politik. Partai politik dengan pola kaderisasi yang rapi disertai dengan penjenjangan kader yang memadai, dan komitmen yang tinggi terhadap rekrutmen akan melahirkan kader-kader mumpuni dan siap menduduki jabatan-jabatan partai politik. Sehingga secara ideal, kontestasi dalam pemilihan, baik dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif merupakan pertarungan antar kader terbaik partai politik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua DPC Partai PKS Kota Banda Aceh dalam wawancaranya:

*Selain memberi peluang bagi kader internal yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif kami sebagai pengurus menyeleksi sejauh mana perkembangan dan prestasi yang telah dilakukan oleh anggota partai ataupun anggota partai yang telah menduduki kursi DPRK.*

Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD lebih khusus jika kader tersebut memiliki prestasi serta potensi untuk dipilih sebagai seorang caleg (selektif). Bidang Kaderisasi PKS Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

*Dari internal kader sendiri kami memberi kesempatan bagi mereka yang ingin mencalonkan diri, sedangkan untuk eksternal kami juga membuka peluang untuk semua orang dengan profesi apa saja, serta melakukan pendekatan dengan figur-figur yang memang memiliki basis massa yang jelas dan banyak.*

Rekrutmen calon legislaif dari pihak internal lebih diutamakan dengan pertimbangan bahwa, secara kualitas calon anggota legislatif yang direkrut melalui sistem rekrutmen partai akan lebih berkualitas ketimbang figur yang direkrut secara terbuka atau dari eksternal. Hal itu mengingat salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen untuk menghasilkan calon pemimpin. Dengan memilih dan menyeleksi dari kader internal tentunya kader tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk menjadi legislator dari tahun-tahun sebelumnya sehingga sudah melalui proses pembinaan.<sup>42</sup>

*Berdasarkan AD/ART, mekanisme rekrutmen PKS lebih mengutamakan anggota partai/kader sebagai calon anggota DPR dengan melakukan proses penjangkaran dan penyaringan dengan memperhatikan jenjang keanggotaan, kapabilitas dan profesionalitas, dan sekurang kurangnya 30% keterwakilan perempuan.*

---

<sup>42</sup> Fanindita Fanina “Rekrutmen Politik Terhadap Perempuan Dalam partai Politik dan Parlemen.” Skripsi, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 22

Rekrutmen politik merupakan tahap awal bagi partai politik dalam rangka regenerasi partai. Baik buruknya kualitas partai di masa mendatang tergantung dari sejauh mana partai berhasil merekrut orang-orang terbaik. Untuk itu, sistem rekrutmen politik yang baik adalah sistem rekrutmen yang memberikan keadilan, transparansi dan demokrasi kepada siapapun yang ingin bergabung dan mempunyai visi yang sama dengan partai.

Oleh sebab itu, partai harus mempunyai kejelian yang lumayan tinggi pada tahapan ini. Jangan sampai kader yang terpilih nantinya hanyalah orang-orang yang hanya menjadikan partai sebagai batu loncatan untuk dirinya saja. Ketika hal ini terjadi maka jangan heran kalau orang-orang seperti ini juga akan mudah hengkang dari partai ketika partai tidak lagi memberi keuntungan politik baginya.

Selain bermanfaat bagi kelangsungan partai dalam waktu yang lama/jangka panjang, para calon kader tersebut haruslah merupakan orang-orang yang mampu untuk memperjuangkan nasib rakyat secara umum dengan tujuan mensejahterahkan dan menjamin keamanan serta kenyamanan hidup bagi setiap warga negara.

Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjatuhkan nama baik partai dan menjauhkan kearah perjuangan dari cita rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Sebagai sarana dalam melaksanakan rekrutmen politik, partai politik memiliki kewajiban dalam beberapa hal:

1. Menyiapkan kader-kader pemimpin politik
2. Melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta
3. Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki Kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Semakin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.<sup>43</sup> Perihal diatas juga disampaikan oleh Ketua DPC Partai PKS Kota Banda Aceh dalam wawancaranya sebagai berikut:

*Dalam memilih anggota legislatif kita tidak hanya melihat massanya, tetapi juga melihat background dan pendidikannya. Karena untuk menjadi perwakilan suara rakyat tentunya kita harus memiliki potensi dan wawasan yang luas untuk mengaspirasikannya, salah satu contohnya anggota anggota DPRK selama dua periode yang juga aktif menjadi vokal dalam melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam penganggaran serta outputnya dalam masyarakat.*

Setiap partai membutuhkan orang-orang yang berkualitas, karena hanya dengan yang demikian partai mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dengan mempunyai peluang untuk mengajukan calon masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

---

<sup>43</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.198.

Calon anggota legislatif merupakan seseorang yang nantinya akan bertindak untuk partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk itu PKS tidak setengah-setengah dalam merekrut kadernya terutama perempuan, karena mereka sadar bahwa untuk menjadi wakil rakyat mereka harus mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kelas menengah kebawah. Selain itu disampaikan juga oleh caleg DPRK Kota Banda Aceh bahwa:

*perekrutan juga melihat kemampuan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kemampuannya. Penilaian objektif tersebut pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan. Cara yang digunakan oleh PKS yaitu untuk perekrutan anggota untuk menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) dari PKS. Perekrutan ini menggunakan sistem merita karena nantinya akan ada seleksi terbuka (fit and proper test) yang diadakan oleh PKS melalui seleksi yang dilakukan oleh masing-masing DPC lalu diteruskan ke DPD.*

## 2. Jenjang Karir

Kemudian Tim Pemenangan Calon Legislatif DPRK Kota Banda Aceh juga menjelaskan tentang jenjang karir diantaranya adalah sebagai berikut:

*“Sistem karir juga digunakan untuk merekrut. Sistem ini sudah lama dipergunakan secara luas di dalam organisasi partai politik maupun organisasi lainnya. Sistem karir digunakan oleh kader partai yang sudah lama menjadi anggota partai maupun anggota yang baru menjadi anggota”.*

*“Sistem ini digunakan oleh PKS untuk menilai seberapa jauh kemajuan anggota partai melalui usaha yang dilakukannya. Melalui sistem ini anggota partai nantinya akan bisa naik kedudukannya di dalam partai. Tentunya melalui beberapa proses tahapan dan seleksi yang dilakukan oleh partai”.*

Melihat sistem rekrutmen yang dilakukan PKS, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan PKS dibagi menjadi dua, pertama mekanisme terbuka dan yang kedua mekanisme tertutup. Cara rekrutmen tersebut dinilai sangat kompetitif karena nantinya partai politik mampu menilai kemampuan anggotanya untuk dapat bersaing di dunia politik dan ini sesuai dengan paham demokrasi.

Sedangkan mekanisme tertutup biasanya dilakukan dalam merekrut kader baru dengan cara merekrut keluarga sendiri menjadi anggota kader. Jika melihat anggota legislative PKS Kota Banda Aceh yang mendapatkan kursi rata-rata berasal dari keluarga kader PKS itu sendiri walaupun juga ada beberapa yang dari non kader PKS.

### **4.3. Tantangan Proses Rekrutmen Caleg PKS pada Pemilu 2024 di DPC Kota Banda Aceh**

#### **4.3.1 Tantangan Rekrutmen Terbuka**

##### **1. Krisis Ideologi**

Dalam proses rekrutmen tersebut juga didapati tantangan-tantangan yang menghambat Partai PKS dalam menjalankan tugasnya. Salah satu hal penting dalam ilmu politik adalah ideologi. Begitu pula bagi partai politik. Ideologi

berasal dari kata “idea” yang berarti ide dan logos yang berarti ilmu. Ideologi sangat penting karena mereka adalah pembeda antara partai yang satu dengan yang lainnya. Ideologi politik pada dasarnya adalah himpunan nilai, ide, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar untuk menentukan perilaku politik seseorang.

Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta, serta kehidupan, dan mampu diyakini dapat menyelesaikan problematika kehidupan. Ideologi dalam praksis ilmu sosial dibagi menjadi dua: secara fungsional dan structural. Fungsionalnya adalah bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang dianggap paling baik tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan secara struktural merupakan sistem pembenaran. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Anggota DPRK PKS Kota Banda Aceh dalam wawancaranya:

*“Ideologi sangat penting karena ini menjadi pembeda antara partai yang satu dengan yang lainnya. Ideologi ini berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta, serta kehidupan, dan mampu diyakini dapat menyelesaikan problematika kehidupan. Jadi sangat penting sebenarnya menanamkan ideologi yang sejalan dengan partai agar identitas dan loyalitas kadernya terjamin. Jikalau ideologi samar samar maka akan sangat sulit untuk menentukan arah dan bergerak bersama seperti kehilangan identitas”.*

Manusia, jika bertindak tanpa ideologi, mereka akan mengalami kehilangan secara spiritual dan emosional. Sehingga, ini membuat mereka kehilangan identitas sejati. Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pema-haman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa.

Sementara “keyakinan” dan “utopi” memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairan dan darah perjuangan, sekaligus memompakan semangat rela berkorban. Ideologi dalam beberapa perkembangan terakhir diartikan sebagai konsep yang elusif dalam ilmu sosial.

Banyak tafsir tentang ideologi yang mengakibatkan interpretasi dan makna yang beragam. Dalam ilmu politik, ideologi dapat menunjukkan alternatif nilai yang bisa digunakan, sehingga mendorong terlahirnya pertentangan berupa cara pandang dan keyakinan. Kemudian selain itu, ideologi memicu terlahirnya tolak ukur intelektualitas.

Selain itu juga disampaikan bahwa ideologi digunakan untuk menentukan arah dan tujuan. Namun, karena sifatnya yang abstrak, butuh sebuah platform yang dapat memperjelas makna dari ideologi tersebut. Platform partai sangat diperlukan karena ideologi yang bersifat abstrak akan menimbulkan kebingungan dan beragam interpretasi masyarakat.

Fenomena ini sangat menarik karena menunjukkan kuatnya partai untuk memenangkan sebuah kontestasi pemilu tanpa memperdulikan persoalan ideologi. Karena untuk meraih kemenangan, partai politik membidik pemilih berdasarkan basis massa. Inilah sebabnya mengapa istilah partai nasionalis-religius muncul. Penganutan dua sistem ideologi yang fleksibel tapi bermuka dua ini membuat partai politik memiliki keleluasan untuk masuk ke dalam berbagai segmen masyarakat, hal ini terjadi dalam partai PKS. Seperti yang disampaikan dalam wawancara di bawah:

*“Platform partai sangat diperlukan karena ideologi yang bersifat abstrak akan menimbulkan kebingunan dan beragam interpretasi masyarakat. Fenomena ini sangat menarik karena menunjukkan kuatnya partai untuk memenangkan sebuah kontestasi pemilu tanpa memperdulikan persoalan ideologi”.*

*“Karena untuk meraih kemenangan, partai politik membidik pemilih berdasarkan basis massa. Inilah sebabnya mengapa istilah partai nasionalis-religius muncul. Penganutan dua sistem ideologi yang fleksibel tapi bermuka dua ini membuat partai politik memiliki keleluasan untuk masuk ke dalam berbagai segmen masyarakat, hal ini terjadi dalam partai PKS”.*

## **2. Menarik Simpatisan dari Masyarakat**

Selain itu ditambahkan oleh Caleg DPRK Kota Banda Aceh bahwa menarik simpati masyarakat adalah hal yang sangat sulit, karena harus mengubah pola pikir masyarakat yang sudah mengenal dunia politik sejak lama, mereka beranggapan bahwa dunia politik itu kejam dan hanya mengumbar janji-janji tanpa menepatinya atau tanpa hasil.

Mengubah pandangan masyarakat yang demikianlah menjadi tantangan yang berat dalam dunia politik sehingga para caleg harus membuat berbagai strategi untuk mengubah pola pikir tersebut. Ada tantangan, yaitu dari segi masyarakat sangat sulit menarik simpati mereka, jadi harus membuat berbagai cara agar dapat menarik simpati masyarakat.

Setiap individu dari masyarakat memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda sehingga kesulitan yang dihadapi oleh para caleg untuk menyatukan pemahaman tersebut menjadi tantangan dalam pemilihan tahun 2024.

Pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat sejak dulu tentang politik menjadikan politik adalah sesuatu yang sistem kerjanya kejam.

### 3. Identitas/ Bukan Orang Setempat

Tantangan selanjutnya bagi yang diusung menjadi caleg yang bukan putra lokal sangat sulit untuk bersosial karena sosok yang belum dikenal oleh masyarakat, jadi harus membuat berbagai strategi untuk bisa berbaur dengan masyarakat sehingga dikenal oleh banyak masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Caleg DPRK Kota Banda Aceh bahwa:

*“Saya bukan putra lokal daerah dan saya belum dikenal oleh masyarakat oleh sebab itu saya harus mempunyai strategi-strategi. 2 tahun sebelum menjadi caleg saya membuat strategi dengan menargetkan para kaum ibu dan para pemuda”.*

Sosok yang baru jika muncul dikalangan masyarakat memang sangat sulit di mana kita untuk berbaur dengan orang yang baru membutuhkan beberapa keberanian dan bagaimana caranya kita dalam bergaul bisa menimbulkan kesan yang baik. Hal ini juga dialami oleh salah satu caleg dari partai PKS. Karena sosok beliau yang baru maka beliau belum dikenal oleh masyarakat setempat, jadi beliau harus membuat strategi-strategi agar beliau dapat dikenal dalam masyarakat dan harus banyak meluangkan waktu untuk bergabung dengan masyarakat setiap ada acara sosial dalam masyarakat tersebut.

Kemudian ditambahkan juga oleh Tim pemenangan caleg bahwa Sistem rekrutmen partai yang lemah selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbicarakan. Terlebih, maraknya fenomena “naturalisasi” atau sistem

pindah kader dari satu partai ke partai yang lainnya. Bukti ini menurut penulis cukup jelas untuk menunjukkan bahwa rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan partai politik lemah dan memprihatinkan.

Selain itu, ketika ditelusuri lebih lanjut, ada hubungan antara luntarnya ideologi dengan rekrutmen partai. Mudah-mudahan setiap kader untuk pindah dan juga tingkat penerimaan partai yang terbuka menyuratkan akan kegagalan partai dalam penanaman ideologi terhadap kadernya dan juga ada disfungsi antara pola kaderisasi dan sistem rekrutmen partai. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam wawancaranya:

*“Adanya kader yang pindah pindah partai menjadi tantangan tersendiri bagi Partai PKS. Kebanyakan yang pindah ini karena tidak menang pada periode sebelumnya, jadi partai harus melakukan rekrutmen kembali untuk mencari kader lain yang setia pada partai”.*

Kondisi ini juga mendorong partai untuk mencari kader yang memiliki finansial yang mapan. Alhasil, partai bukannya melakukan rekrutmen kader-kader yang handal, namun berubah menjadi agen penyedia “tiket” posisi-posisi publik. Berdasarkan realita yang terjadi Partai pks rekrutmen politik saat ini belum sepenuhnya berjalan terbuka, transparan, dan demokratis, karena dapat diamati dari pemilihan kader yang tidak objektif.

Kaderisasi yang berjalan pun tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan (instan). Pembinaan kader hanya dilakukan menjelang pemilu, itu pun kader yang dibina tidak dijamin bisa mendapatkan nomor urut kecil di surat suara. Dalam waktu singkat, para para kandidat yang dipilih secara diam diam ini

dapat menjadi elit partai karena memiliki “modal politik” yang lebih besar daripada kader binaan partai.

#### 4.3.2. Tantangan Rekrutmen Tertutup

##### 1. Mencoreng Citra Partai

Dalam proses rekrutmen politik di Indonesia dilakukan secara tertutup elitis dan tidak akuntabel. Proses itulah yang nantinya dapat membuat jarak bagi anggota dan pemilih. Seperti yang disampaikan oleh bidang kaderisasi Partai PKS dalam wawancaranya:

*“Hal ini akhirnya membuat rekrutmen politik citranya sangat jauh dari politik gagasan, tetapi politik elitis, politik yang dekat dengan siapa yang berkuasa di partai”.*

Menurutnya, hal itu nantinya berimplikasi pada sebuah tendensi terjadinya praktik politik transaksional. Sebab, banyak terdengar bahwa untuk melanggang ke dunia politik membutuhkan mahar.

*“Kita mendengar untuk mendapat nomor 1 harus sekian ratus juta bahkan miliar. Nah hal-hal ini justru membuat kredibilitas rekrutmen politik yang demokratis tadi akhirnya menjadi tidak terciptan”.*

Oleh karenanya, rekrutmen politik harus kembali pada esensi dasar sebagai sebuah proses yang merefleksikan kaderisasi secara demokratis serta tidak menutup ruang partisipasi politik.

*“Dia harus didesain terukur dan mampu dinilai akuntabilitasnya secara terbuka oleh publik. Tidak lagi kemudian ukuran-ukura rekrutmen*

*berbasis kaderisasi secara demokratis itu menjadi ukuran yang tidak punya standar penilaian yang terbuka”.*

## **2. Persyaratan Pencalonan Anggota Legislatif Tidak Disampaikan Secara Umum**

Kelemahan lain dari proses rekrutmen politik pada partai politik yaitu segala persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara umum. Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi anggota legislatif hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja sehingga masing-masing calon legislatif mayoritas dipegang oleh orang-orang yang memiliki jabatan di partai.

Seharusnya persyaratan tersebut dapat disosialisasikan melalui bermacam cara, misalnya melalui pamflet, poster, atau melalui media massa, seperti halnya ketika perusahaan dalam mencari tenaga kerja. Hal ini disampaikan oleh bidang kaderisasi dalam wawancaranya:

*“Kebanyakan rekrutmen semacam ini persyaratan untuk direkrut menjadi tidak diperhatikan lagi karena dianggap sudah memampuni. Seharusnya walaupun direkrut secara tertutup juga harus mempersiapkan syarat yang sama agar lebih demokratis dan tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak pihak lainnya”.*

Jadi cara seperti ini akan lebih kompetitif dan demokratis. Karena hal ini akan mengundang persepsi masyarakat secara luas, bahwa pencalonan anggota legislatif pada partai politik tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus partai saja

tetapi masyarakat secara umum diluar partai juga mempunyai kesempatan untuk ikut berkompetisi dan memonitor dalam proses pencalonan legislatif.



## **BAB V PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Proses rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2024 di DPC Kota Banda Aceh dilakukan dengan dua metode yakni rekrutmen terbuka dengan rekrutmen tertutup. Pada rekrutmen terbuka dilakukan memberikan kesempatan secara luas kepada seluruh warga negara untuk andil dan bersaing dalam proses penyeleksian. Adapun pola yang dilaksanakan pada rekrutmen terbuka terbagi menjadi rekrutmen individual dan rekrutmen institusional.

Kemudian pada rekrutmen dengan pola tertutup dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada skala yang lebih kecil dimana hanya individu-individu tertentu saja yang dapat menduduki jabatan politik tertentu seperti kawan akrab, pengusaha, individu-individu yang mempunyai persamaan agama yang sama dan sebagainya. Selanjutnya pada pola yang ini terdapat 2 metode pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan dengan kader internal dan dengan jenjang karir.

Adapun untuk tantangan yang dialami pada proses rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2024 mencakup kepada tantangan rekrutmen terbuka dan tantangan rekrutmen tertutup. Pada rekrutmen terbuka didapati tantangan berupa krisis ideologi, menarik simpatisan dari Masyarakat dan berupa identitas atau bukan orang setempat yang akan menjadi Caleg. Kemudian untuk tantangan rekrutmen tertutup meliputi tercorengnya citra

partai kemudian persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara umum.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah didapatkan sebelumnya dan berbagai teori yang sudah disampaikan maka peneliti menawarkan beberapa saran untuk diterapkan kedepannya. Adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

Kepada Partai Keadilan Sejahtera DPC Banda Aceh diharapkan untuk kedepan meminimalisir rekrutmen secara terbuka untuk penentuan Caleg. Hal ini dikarenakan rekrutmen secara terbuka akan menjadikan Caleg yang terpilih memiliki kualitas dan ideologi yang kurang tinggi sehingga akan berdampak kepada apa yang akan diperjuangkan di parlemen.

Begitu juga sebaliknya untuk memaksimalkan rekrutmen secara tertutup dengan tujuan akan meningkatkan kualitas Caleg yang akan bertarung di Pemilihan Umum sehingga baik secara kualitas dan ideologi tidak perlu untuk diragukan disamping harus meningkatkan kemampuan secara terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Ghaffar (2013) *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aliah Maharani Tenar, La Ode Harjudin dan Joko (2024) Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 (Studi DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara). *Jurnal Politik dan Demokrasi*. 2(1). hlm. 18-23.
- Aseng Yulanda, Azmi Fitrissia dan Ofianto (2023) Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi. *Jurnal Ilmu Humaniora*. 7(1). hlm. 141-154.
- Cholisin dkk (2016) *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: FISE UNY.
- Delya Afrida Sari, Wawan Budi Darmawan dan Firman Manan (2021) Rekrutmen Calon Legislatif Muda Partai Golongan Karya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. 3(3). 987-995.
- Dewi Aulia Wandarianti (2024) Pola Rekrutmen Politik tanpa Mahar Partai Nasdem: Studi Kasus Rekrutmen Calon Legislatif di DPD Patai Nasdem Kabupaten Karawang Pada Pemilu 2019. *Skripsi Dipublikasi UIN Sunan Gunung Jati*.
- Edeltrudis Calasansia Murni dan Haryo Ksatrio Utomo (2023) Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu dari Partai Gerindra dalam Pileg 2019 di DKI Jakarta. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*. 5(1). 791-804.
- Fadillah Putra (2012) *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Fadillah Putra (2013) *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiarawacana.
- Farchan Bulkin (1985) *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Firmanzah (2011) *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Johani Dimiyati (2013) *Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Komarudin Sahid (2011) *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lexi J. Moleong (2018) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Makaukabah Alwadlo (2019) Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019). *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 2021. 1(2). 24-44.
- Maruto MD dan Anwari WMK (2012) *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mayang Sari Lubis (2018) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Musthada dan Indiana Ngenget (2023) Analisis Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. 7(1). hlm. 99-110.
- Nasikum (2004) *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Ni Luh Rosita Dewi, I Wayan Gede Suacana dan Diah Rukmawati (2023) Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*. 3(1). hlm. 17-29.
- Puja Dewangga dan Ratnia Solihah (2024) Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. 19(1). hlm. 66-90.
- Putri Kinantiara (2024) Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif PDI-P Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi: di Kabupaten Bener Meriah). *Skripsi*

*Dipublikasi.*

- Rahmat K, Muh Iqbal Latief dan Andi Haris (2023) Sistem Rekrutmen Partai Gerindra (Menuju Pemilu Tahun 2024) Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Sosial*. 3(3). hlm. 473-479.
- Roby Arya (2016) *Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis*. Depok: Pustakan Kemang.
- Sevtia Amalia Silvi (2024) Proses dan Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Pada Pemilu 2024. *Skripsi Dipublikasi*.
- Suharno (2014) *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soelistyati Ismail Gani (1984) *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetomo (2012) *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*. Jakarta: Prenada.
- Sutri Destimi Elsi, Navarin Karim, Hapsa dan Hatta Abdi Muhammad (2023) Rekrutmen Calon Legislatif Berkualitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*. 1(10). hlm. 2440-2447.
- Wahyu Tristiana, Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih dan Dian Suluh Kusuma Dewi (2023) Analisis Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1(7). hlm. 2722-2853.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Pertanyaan Penelitian

#### A. Ketua Partai PKS

1. Bagaimana Fungsi Partai Politik dalam suatu negara ?
2. Bagaimana Peran Partai Politik dalam suatu negara ?
3. Strategi apa yang dilakukan oleh PKS pada pemilu DPRK 2024 di Banda Aceh ?
4. Bagaimana cara dan strategi PKS untuk mendapatkan kursi di DPRK Banda Aceh ?
5. Bagaimana bentuk kandidasi caleg yang dilakukan oleh Partai PKS ?
6. Apa tujuan Partai PKS dalam menjalankan Kandidasi tersebut ?
7. Apa yang menjadi kriteria dalam proses kandidasi caleg Partai PKS ?
8. Bagaimana prosedur atau tahapan Kandidasi caleg di Partai PKS ?
9. Apa tantangan terbesar saat melakukan Kandidasi Caleg Partai PKS ?

#### B. Bidang Kaderisasi Partai PKS Banda Aceh

1. Apa yang melatarbelakangi anda menjadi kader Partai PKS ?
2. Sebagai kader, kira kira strategi apa yang digunakan dalam mengkampanyekan Partai PKS sebagai partai yang memiliki elektabilitas tinggi ?
3. Bagaimana pandangan kader terhadap proses kandidasi Caleg yang dilakukan PKS ?
4. Apa tantangan terbesar partai PKS dalam membangun citra dan kampanye kepada masyarakat ?

#### C. Anggota Legislatif Partai PKS Banda Aceh

1. Apa yang melatar belakang Anggota untuk menjadi Caleg ?
2. Mengapa anggota memilih mengikuti Seleksi Caleg Partai PKS ?
3. Apa tantangan terbesar saat mengikuti Seleksi Caleg Partai PKS ?
4. Bagaimana proses kampanye sebagai Caleg Partai PKS ?
5. Apa faktor hambatan saat kampanye ?
6. Sebagai Caleg terpilih, strategi apa yang digunakan dalam mengkampanyekan Partai PKS sebagai partai yang memiliki elektabilitas tinggi di kalangan masyarakat ?
7. Bagaimana pandangan Anggota legislative terhadap proses kandidasi Caleg yang dilakukan partai PKS?

## Lampiran II. Surat Penelitian

www.pks.id



Nomor : 287/K/PBR/AA-01-PKS/IV/1445  
Lamp : -  
Perihal : **Pemberitahuan**

Banda Aceh, 30 April 2024

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**  
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Berdasarkan surat dari Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry bernomor: B-658/ Un.08/ FISIP.1/ PP.00.9/ 03/ 2024 berkaitan Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama:

Nama : Aklima Handayani  
Nim : 170801089  
Jurusan : Ilmu Politik  
Alamat : Desa Blang Krueng

Benar mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara guna melengkapi data- data penelitiannya yang berjudul: **Proses Rekrutmen dalam Partai PKS Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Calon Legislatif DPRK Kota Banda Aceh)**, di sekretariat DPD PKS Kota Banda Aceh.

Demikian surat ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

دewan الرانیری

**DEWAN PENGURUS DAERAH  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
KOTA BANDA ACEH**

A R - R



**ZULFIKAR**  
Sekretaris

### Lampiran III. Dokumentasi Wawancara



**Wawancara dengan Ketua Partai PKS Banda Aceh  
Farid Nyak Umar, S.T**



**Wawancara dengan Calon Anggota Legislatif Partai PKS Banda Aceh  
Tuanku Muhammad, M.Ag & Aslianti Eliya**



**Wawancara dengan Tim Pemenangan Partai PKS Banda Aceh**



**Wawancara dengan Bidang Kaderisasi Partai PKS Banda Aceh  
H. Saifunyah, S.E, M.Si, Ak**